

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya (Ardiana dkk, 2010).

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh) dalam menghadapi krisis tersebut (Kristiyanti, 2012).

Berkaitan dengan Usaha Kecil Mikro dan Menengah tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai regulator telah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai landasan hukum dalam dunia usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena tujuan dari adanya regulasi tersebut adalah melindungi para pelaku usaha khususnya

yang masih bergelut pada bagian Mikro, Kecil dan Menengah seperti yang terdapat pada pasal 8, 9 dan 10 pada bab 5 Undang-Undang tersebut, para pelaku usaha mendapatkan bantuan dari pemerintah diberbagai aspek antara lain aspek pendanaan dan juga aspek sarana prasarana (UU. No 20 Tahun 2008).

Pada tahun 2013 secara Nasional kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto adalah sebesar 57,48% dan juga UMKM sebesar 99,99% dari jumlah pelaku usaha menunjukkan eksistensi UMKM dalam menunjang perekonomian negara Indonesia. UMKM sektor perdagangan menempati urutan kedua setelah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Berdasarkan kontribusi yang diberikan, UMKM sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDB paling besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya (Kemendag, 2013). Untuk Propinsi Jawa Timur tahun 2011 rasio UMKM terhadap total PDRB adalah 54,34% dan pada Tahun 2012 adalah 54,480%. Untuk tahun 2013 tercapai 54,81%. Sedangkan pada tahun 2014 capaian sebesar 55,14% (Dinas Koperasi dan UMKM, Jawa Timur, 2014). Untuk Kabupaten Ponorogo berdasarkan skala usahanya, usaha kecil masih mendominasi penyaluran kredit UMKM dengan pangsa kredit mencapai 44,37%, disusul kredit usaha skala mikro 37,72% dan skala menengah 17,91% (Bapeda Ponorogo, 2015).

Seluruh rangkaian kebijakan yang berkaitan dengan UMKM baik melalui guliran modal maupun penerbitan produk hukum pada dasarnya

ditujukan untuk meningkatkan kinerja UMKM sebagaimana yang tertera dalam tujuan setiap penerbitan regulasi yang berkaitan.

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Usaha kecil Menengah (UKM) secara umum terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam unit usaha industri kecil dan menengah dan faktor eksternal yang bersumber dari luar unit usaha yang memiliki banyak ragam (Liedhlom dalam Purwidhianti dan Rahayu, 2015).

Menurut Sudiarta, dkk (2014) Faktor internal UKM yang dapat mempengaruhi kinerja yang pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai subjek yang menjalankan UKM baik pemilik maupun pekerja tentu peranannya sangat penting bagi keberlangsungan UKM, meningkatnya kualitas SDM akan berdampak pada peningkatan kinerja UKM. Faktor kedua adalah faktor permodalan, modal sangat dibutuhkan dalam setiap usaha khususnya untuk UKM yang seringkali dianggap tidak *bankable*. Modal yang besar akan mendukung UKM dalam memproduksi komoditas yang besar sehingga mampu meningkatkan pendapatan (Sudiarta, dkk. 2014).

Teknik produksi dan juga pemasaran juga menjadi alasan utama bagi UKM untuk terus melakukan aktifitasnya. Tanpa adanya pasar yang pasti, maka UKM akan kehilangan pemasukannya. Pemenuhan faktor-faktor internal tersebut selain harus dicapai oleh UKM sendiri juga membutuhkan peranan dari faktor eksternal salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan UKM. Salah satu kebijakan pemerintah adalah

kebijakan mengenai permodalan yang secara khusus diberikan kepada UKM, supaya memiliki modal untuk berkembang (Sudiarta, Dkk. 2014).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah salah satu pemerintahan yang memberikan perhatian besar terhadap sektor UKM. Terbukti pada kebijakan penyaluran kredit oleh perbankan pemerintah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 mencapai 1,50 triliun rupiah, namun pertumbuhannya 7,73% melambat dibanding tahun sebelumnya 19,62% (Bapeda Ponorogo, 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Ponorogo (2015) penduduk Kabupaten Ponorogo memiliki mata pencaharian yang beragam. Salah satunya adalah berwirausaha dengan mendirikan usaha kecil dan menengah (UKM). Ponorogo memiliki banyak UKM yang berada pada berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, peternakan, pertanian dan lain- lain.

Jumlah UKM di Ponorogo yang memiliki SIUP tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 berjumlah 1.097 unit, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 1.102 unit, dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi 1.304 unit, tetapi pada tahun 2013 UKM di Ponorogo mengalami penurunan, sehingga menjadi 1.091 unit, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi menjadi 1.012 unit penyebaran UKM terbanyak berada di wilayah Kecamatan Ponorogo yang hampir mendekati nilai setengah total UKM (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2015).

Berbagai penelitian mengenai yang ada juga menyimpulkan berbagai indikator lain yang turut mempengaruhi kinerja UMKM diantaranya adalah Munizu (2010), Lofian dan Riyoko (2014) yang menyimpulkan bahwa bahwa pertumbuhan usaha kecil dan menengah dipengaruhi pemilik, pekerja, aspek keuangan, aspek teknik produksi dan aspek pemasaran sebagai faktor internal. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah kebijakan pemerintah dalam sektor UKM, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta aspek peranan lembaga terkait. Ardiana dkk (2010) dan Purwanti (2012) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kinerja UKM dan modal usaha juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UKM/ kinerja UKM. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Samir (2011) menunjukkan bahwa modal psikologis, manajemen sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kinerja UKM. Namun dalam penelitian ini juga mencantumkan karakteristik entrepreneur dan karakter UKM yang hasilnya tidak signifikan terhadap kinerja UKM.

Berdasarkan uraian masalah dan hasil dari berbagai penelitian pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kinerja Usaha Kecil menengah di Kecamatan Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Ponorogo?
2. Apakah faktor internal berpengaruh terhadap kinerja Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Ponorogo?
3. Apakah faktor eksternal dan faktor internal secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor eksternal berpengaruh terhadap kinerja Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui faktor internal berpengaruh terhadap kinerja Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Ponorogo.
3. Untuk mengetahui faktor eksternal dan faktor internal secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan di bidang Usaha Kecil Menengah (UMKM) khususnya dalam penilaian kinerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan pengembangan, inovasi dan evaluasi usaha serta dalam penilaian perkembangan usaha yang sedang dijalankannya.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti terutama dalam hal kinerja Usaha Kecil Menengah dan aspek-aspek yang turut mempengaruhinya. Dengan demikian peneliti mampu memahami berbagai persoalan yang ada di lapangan usaha pada saat telah terjun dalam dunia usaha.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, ataupun menyempurnakan.